

**POLITISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**1. Drs. Syaiful, M.Si**

**2. Dr. Indah Adi Putri, M.IP**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Politisasi ASN kerap menjadi sebuah *issue* yang terus muncul ketika Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan. Bahkan, politisasi ASN kerap kali dijadikan sebagai upaya strategi untuk merebut sebuah kekuasaan di pemerintah. Kota Solok sebagai sebuah daerah yang juga ikut menyelenggarakan Pilkada 2020 tidak bisa terlepas dari persoalan *issue* politisasi ASN yang dilakukan oleh Kepala Daerahnya. Hal ini diketahui dari pemberhentian seorang Kepala Dinas di Kota Solok sebelum Pilkada dilaksanakan, kemudian disusul dengan pencabutan Hak Pengguna Anggaran (PA) yang dilakukan oleh Kepala Daerahnya terhadap empat orang Kepala Dinas di Kota Solok, tepat dua bulan setelah pelaksanaan Pilkada 2020. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan seperti apa yang dilakukan Kepala Daerah di Kota Solok terhadap Kepala Dinasnya tersebut. Landasan teori yang digunakan berasal dari Barbara Geddes mengenai kepentingan politisi terhadap birokrasi yaitu, *current survival*, *creation of loyal political machine*, dan *effective government*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan Kepala Daerah Kota Solok terhadap pejabat ASN di Kota Solok adalah ingin melihat sejauh mana loyalitas pejabat kepadanya. Hal ini diketahui dari *test case* yang dilakukan oleh Kepala daerah berupa pencabutan hak PA sementara terhadap empat orang kepala dinas. Test case yang dilakukan melanggar Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Test case* serupa juga pernah dilakukan ketika Kepala Daerah menjabat sebelumnya.

**Kata Kunci: Politisasi ASN, Pemilihan Kepala Daerah, Loyalitas**



## ABSTRACT

Civil Servant Politicization often became an issue which always arise when Regional head elections was held, and it is always to be regularly one of the strategy to seize control to take up space from a government in power. Solok city as a region held this election in 2020 was inseparable from this issue that is carried out by their own head region. This was discovered by services chief dismissal before the election was held, then followed by revocation of Budget User against 4 services chief 2 months after election. This thesis aims to know what kind interest of Solok head region did to services chief. The theoretical basis from this thesis will be from Barbara Geddes about Politician Interest against bureaucracies which is current survival, creation of loyal political machine, and effective government. Methods used in the studies is qualitative. Result from this studies The kind interest of Solok head region against services chief to saw their loyalty, it was known by test case who did by Head Region such as revocation of Budget User against 4 services chief. The test case was violate Regulation of the minister of Home Affairs number 77 year 2020 about Financial Management Technical Guidelines. This test case were also undertaken by previous Regional Head

**Key Words: Civil Servant Politicization, Regional Head Election, Loyalty.**

